

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"
7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Implementasi Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai Usaha Peningkatan Mutu Produk Hewan di Kabupaten Bandung Barat

Acep Rohimat ^a, Septiana Dwiputrianti ^b, Arundina Pratiwi ^c, Sait Abdullah ^d,
dan Muhammad Nur Afandi ^e

^aDinas Perikanan dan Peternakan, Kabupaten Bandung Barat
^{b,c,d,e} Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^a21120030@poltek.stialanbandung.ac.id;

^bseptiana.dwiputrianti@poltek.stialanbandung.ac.id; ^carundina@poltek.stialanbandung.ac.id;

^dsait@poltek.stialanbandung.ac.id; ^em.n.afandi@gmail.com

Abstrak

Protein hewani sangat penting bagi tubuh manusia karena mengandung asam amino dan zat lain yang esensial untuk metabolisme. Namun, protein hewani dari sumber hewan rentan terhadap kerusakan oleh mikroorganisme dan kontaminan lainnya. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif terhadap produk pangan asal hewan diperlukan, mulai dari fasilitas produksi hingga konsumsi. Nomor Kontrol Veteriner (NKV) merupakan sertifikasi tertulis yang sah, menegaskan kepatuhan terhadap persyaratan kebersihan dan sanitasi untuk menjamin keamanan produk hewan. Meski demikian, banyak masyarakat yang belum mengetahui peran krusial NKV dalam menjamin mutu produk. Kabupaten Bandung Barat memiliki ragam produk pangan, termasuk yang berasal dari hewan. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi NKV pada usaha produk hewan di Kabupaten Bandung Barat. Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas birokratis; melainkan menandakan komitmen untuk menjaga standar kebersihan dan keamanan tertinggi sepanjang rantai produksi. Saat konsumen semakin memprioritaskan keamanan pangan, pemahaman dan penghargaan terhadap pentingnya sertifikasi NKV dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk pangan asal hewan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi NKV memengaruhi usaha produk hewan di Kabupaten Bandung Barat, dengan penekanan pada peran krusialnya dalam menjamin kualitas dan keamanan produk pangan asal hewan. **Kata kunci:** pangan asal hewan, higien sanitasi, NKV.

Implementation of Veterinary Control Number (NKV) Certification as an Effort to Improve the Quality of Animal products in West Bandung Regency

Abstract

Animal protein is crucial for human health due to its content of amino acids and essential substances for metabolism. However, animal-derived protein is prone to spoilage by microorganisms and contaminants. Effective supervision from production to consumption is vital. The Veterinary Control Number (NKV) serves as valid

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

certification, confirming compliance with hygiene standards for animal product safety. Despite its significance, public awareness of NKV's role in ensuring product quality is limited. Bandung Barat Regency, with its diverse animal-origin products, necessitates an examination of NKV certification policy implementation in animal product enterprises. Beyond bureaucratic formality, NKV signifies a commitment to high hygiene and safety standards throughout the production chain. Understanding NKV's importance fosters public confidence in locally produced animal products, aligning with the growing emphasis on food safety. This study explores NKV certification policy impact on animal product enterprises in Bandung Barat, emphasizing its critical role in ensuring the quality and safety of animal-derived food products.

Keywords: food of animal origin, hygiene sanitation, NKV.

A. PENDAHULUAN

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari berbagai sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pentingnya keamanan pangan merupakan salah satu isu kebutuhan masyarakat yang saat ini sedang mulai muncul di masyarakat. Pangan asal hewan merupakan pangan yang bersifat mudah rusak dan berisiko sebagai bahan pembawa penyakit, namun disisi lain pangan asal hewan merupakan salah satu sumber protein tinggi.

Pangan asal hewan yang baik, harus memenuhi kaidah ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Aman diartikan bahwa bahan pangan asal hewan yang dihasilkan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, Sehat diartikan bahwa bahan pangan asal hewan tersebut mengandung berbagai zat yang diperlukan oleh tubuh, Utuh diartikan bahwa bahan pangan asal hewan tersebut kandungannya tidak mengalami pengurangan atau tidak mengalami penambahan zat yang lain, dan Halal dapat diartikan bahwa bahan pangan asal hewan tersebut dihasilkan dari proses yang halal sesuai dengan syariat Islam.

Tuntutan jaminan mutu dan keamanan pangan terus saat ini terus berkembang sesuai dengan persyaratan konsumen. Dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan pada masyarakat terhadap pangan asal hewan yang dibeli maupun dikonsumsi, harus berasal dari

unit usaha yang telah memenuhi persyaratan kesehatan veteriner. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Unit Usaha Produk Hewan, yang merupakan bukti tertulis bahwa unit usaha produk hewan tersebut sudah menerapkan jaminan hygiene sanitasi pada proses produksinya.

Tujuan penerbitan sertifikasi NKV diantaranya:

- a) Memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat, bahwa pangan yang berasal dari hewan yang dibeli dan dikonsumsi merupakan berasal dari sarana usaha yang telah memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner yang diawasi oleh pemerintah;
- b) Memastikan unit usaha telah memenuhi persyaratan hygiene-sanitasi dan menerapkan cara produksi yang baik;
- c) Dapat terlaksananya tertib secara hukum dan tertib administrasi dalam pengolahan usaha produk hewan;
- d) Untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan sistem pengawasan terhadap unit usaha di bidang produk pangan asal hewan.

Unit usaha yang wajib mengajukan permohonan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 11 tahun 2020 diantaranya yaitu rumah potong hewan ruminansia, rumah potong hewan unggas, rumah potong hewan babi, budi daya unggas petelur, budi daya ternak perah, usaha pengolahan daging, usaha pengolahan susu, usaha pengolahan telur, ritel, kios daging, gudang berpendingin, gudang kering, usaha penampungan susu, usaha pengumpulan,

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

pengemasan, dan pelabelan, telur konsumsi, usaha penanganan atau pengolahan madu, usaha pencucian sarang burung walet, usaha pengolahan produk pangan asal hewan, usaha pengolahan produk hewan nonpangan dan usaha pengolahan sarang burung walet.

Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu kabupaten yang kaya akan keaneka ragam produk pangan, khususnya pangan asal hewan. Produk pangan asal hewan yang ada di Kabupaten Bandung Barat diantaranya susu, daging sapi, daging ayam, telur dan ikan beserta produk olahan turunannya. Pangan asal hewan mempunyai keterkaitan yang erat dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui perbaikan gizi. Apabila pangan asal ternak tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan maka pangan tersebut tidak hanya menyebabkan gangguan kesehatan atau kematian, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan fisik dan inteligensia masyarakat. Saat ini, unit usaha di kabupaten bandung barat yang sudah memiliki sertifikat NKV diantaranya:

Tabel 1. Unit Usaha di Kab. Bandung Barat

No	Jenis Unit Usaha	Jumlah	Ber NKV	Belum Ber NKV
1	Rumah Potong Hewan Ruminansia	10	1	9
2	Rumah Potong Hewan Unggas	33	0	33
3	Rumah Potong Hewan Babi	0	0	0
4	Budi Daya Unggas Petelur	1	1	0
5	Budi Daya Ternak Perah	0	0	0
6	Usaha Pengolahan Daging	15	2	13
7	Usaha Pengolahan Susu	3	3	0
8	Usaha Pengolahan Telur	17	0	17
9	Ritel	7	0	7
10	Kios Daging	1	0	1
11	Gudang Berpendingin	2	2	0
12	Gudang Kering	3	3	0
13	Usaha Penampungan Susu	7	3	4
14	Usaha Pengumpulan, Pengemasan, Dan	1	1	0

	Pelabelan Telur Konsumsi			
15	Usaha Penanganan Atau Pengolahan Madu	2	0	2
16	Usaha Pencucian Sarang Burung Walet	1	0	1
17	Usaha Pengolahan Produk Pangan Asal Hewan	2	0	2
18	Usaha Pengolahan Produk Hewan Nonpangan	1	0	1
19	Usaha Pengolahan Sarang Burung Walet	0	0	0
Jumlah		106	16	90

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan, 2022

Beberapa permasalahan yang muncul dalam penerapan kebijakan sertifikasi NKV diantaranya:

1. Sertifikasi NKV belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, terutama unit usaha produk hewan non pangan.
2. Unit usaha cenderung mengajukan permohonan NKV pada saat diminta oleh lembaga, ritel dan penegak hukum dalam persyaratan administrasi, misalnya lalu lintas produk hewan antar provinsi dan antar negara.
3. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan hygiene sanitasi yang tertuang dalam sertifikat NKV.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh unit usaha produk hewan
5. SOP (*standar operasional prosedur*) yang merupakan salah satu instrumen penting dalam suatu kegiatan, sering kali belum dibuat dalam bentuk tertulis tapi hanya sebatas omongan dan himbauan.
6. Masyarakat masih trauma dengan proses perijinan yang berbelit dan mahal, padahal pada praktiknya proses pembuatan NKV tidak dipungut biaya.
7. Belum semua unit usaha yang sudah memiliki sertifikat NKV, mempublikasikan maupun menempelkannya pada produk asal hewan yang dihasilkan, padahal apabila sudah mencantumkan akan menambah daya jual kepada masyarakat.

Adapun tujuan dari evaluasi penerapan kebijakan sertifikasi NKV di Kabupaten Bandung Barat diantaranya:

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

1. Mewujudkan objektivitas dan ketidakberpihakan dalam melihat implementasi kebijakan di masyarakat.
2. Mengukur apakah kebijakan teknis yang diterapkan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam hal ini apakah kebijakan sertifikasi NKV pada unit usaha produk hewan tersebut sudah mencapai tujuan kebijakan secara umum dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sebagai konsumen.
3. Secara *administrative operability*, dapat menganalisis kebijakan alternatif yang dapat diberikan dalam proses permohonan sertifikasi NKV bagi unit usaha.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan kejadian, fenomena yang terjadi atau berbagai hal yang berhubungan dengan kebijakan sertifikasi NKV unit usaha produk hewan di Kabupaten Bandung Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen yang terkait dengan sertifikasi NKV, wawancara dengan unit usaha dan diskusi dengan stakeholder peternakan. Wawancara dilakukan dengan perwakilan unit usaha penampungan susu, rumah potong hewan, pengolah susu dan daging yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Dokumen yang ditelaah meliputi peraturan-peraturan, jurnal dan berita dari surat kabar *online*.

B. PEMBAHASAN

Menurut Permentan No.11 Tahun 2020, sertifikat NKV merupakan bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan (Pertanian, 2020). Hal tersebut mengindikasikan NKV dalam dasar penilaiannya harus memenuhi *Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP)* dan *Good Manufacturing Practices (GMP)*.

Sertifikasi NKV merupakan sistem yang mampu dan mengendalikan bahaya resiko agar memenuhi kriteria produk pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) karena melalui pengendalian Sertifikasi NKV, seluruh proses dari penyediaan bahan baku, proses pengolahan, hingga pemasaran produk dapat terjamin keamanan produk yang beredar dan

telah sesuai dengan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada teori Edward III tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan diantaranya yaitu Komunikasi, Sumber daya pelaksana, disposisi dan struktur birokrasi dihubungkan dengan fenomena dan hasil pengamatan di lapangan tentang pelaksanaan kebijakan sertifikasi NKV pada unit usaha produk asal hewan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana berikut:

1. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu kelompok sasaran juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian yang tepat.

Menurut Harold D Laswell, komunikasi merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa dan efeknya apa (*who says what, in which channel to whom, with what effect*)(Suriati dkk, 2022). Berdasarkan unsur-unsur komunikasi, kondisi actual yang terjadi di kabupaten bandung barat sebagai berikut:

- a) Komunikator, Komunikator yang terlibat diantaranya: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Direktorat Kesmavet Kementerian Pertanian
- b) Pesan, Pesan yang disampaikan secara verbal/penyuluhan langsung, menggunakan leaflet dan paparan materi serta menggunakan contoh produk yang sudah memiliki sertifikat NKV.
- c) Media, Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan oleh komunikator diantaranya menggunakan media tatap

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

- muka, kunjungan langsung ke tempat unit usaha, melalui zoom, WA group dan melalui internet.
- d) Komunikasikan, Komunikasikan yang terlibat dalam penyampaian pesan sertifikasi NKV diantaranya:
- Unit usaha produk hewan, baik berbentuk kelompok, perusahaan maupun masyarakat umum.
 - Unit usaha yang secara peraturan wajib memiliki sertifikasi NKV, yaitu Rumah potong hewan / unggas, penampung susu/ KUD, pembudidaya sapi perah / unggas petelur, kios daging / retail, gudang berpendingin/cold storage, pengolahan susu, pengolahan daging, gudang kering.
- e) Pengaruh, dengan adanya sertifikasi NKV produk hewan diharapkan dapat memberikan pengaruh, diantaranya: meningkatkan kualitas produk hewan yang dihasilkan, meningkatkan daya saing produk dan meningkatkan nilai jual produk kepada konsumen
- f) Umpan balik, Umpan balik yang diharapkan dari adanya pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan tentang sertifikasi NKV, diantaranya: adanya kesadaran unit usaha untuk mengurus NKV, adanya kesadaran untuk menerapkan higien sanitasi tanpa adanya paksaan di unit usaha masing-masing.
- g) Lingkungan, Kondisi lingkungan yang sering ditemui diantaranya:
- Unit usaha produk hewan, baik kelompok maupun perusahaan belum memahami secara mendetail tentang sertifikasi NKV.
 - Unit usaha pemasaran sering kali mensyaratkan sertifikasi NKV untuk produk yang masuk kedalam unit usahanya, tanpa memberikan edukasi bagaimana seharusnya mengurus sertifikat NKV.
 - Masih ditemukan anggapan di masyarakat, bahwa semua perijinan memerlukan biaya dan waktu yang lama.
 - Sarana dan prasarana penunjang untuk menerapkan higien sanitasi di tempat produksi sebagai persyaratan untuk memperoleh sertifikat NKV belum memadai
- ## 2. Sumber Daya Pelaksana
- Dalam suatu implementasi kebijakan memerlukan sumber daya pelaksana, tidak terkecuali dalam implementasi kebijakan sertifikasi NKV di Kabupaten Bandung Barat. Dalam prosesnya sumber daya yang bergerak dalam kegiatan ini mengalami beberapa kendala diantaranya:
- a. Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di Dinas Perikanan dan Peternakan belum sepenuhnya mengerti tentang proses sertifikasi NKV, karena sebagian besar merupakan tenaga honorer yang tidak selaras dengan ilmu dan keahlian yang dimiliki. Saat ini SDM yang dimiliki oleh Bidang Bina Usaha selaku sektor yang mengurus rekomendasi NKV terdiri dari 1 dokter hewan pengawas kesmavet, 1 dokter hewan fungsional medic veteriner dan 2 staf lulusan SMA. Dengan komposisi dan jumlah tersebut dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah unit usaha produk hewan yang ada di Bandung Barat, sangat jauh dari ideal. Karena dalam suatu proses pembuatan rekomendasi, audit, surveilan membutuhkan tenaga yang handal dan sesuai kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Permentan tersebut.
 - b. Sumberdaya implementasi kebijakan sertifikasi NKV di wilayah kecamatan belum memadai, dari sisi jumlah pegawai yang cukup mengerti dengan konteks kebijakan sangat terbatas, disamping itu tingkat keahlian yang cukup memadai untuk mengimplementasikan kebijakan yang memerlukan cara komunikasi, keterampilan menganalisa permasalahan baik dilapangan maupun secara administratif juga sangat terbatas.
 - c. Sumber daya yang dimiliki oleh unit usaha sangat beragam, bahkan sebagian besar tidak memiliki tenaga administrasi dan tenaga ahli yang konsen dalam hygiene dan sanitasi, sehingga diperlukan pendampingan yang lebih dan terfokus

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

terutama dalam proses pembuatan SOP (standart operation procedure) dan pembuatan administrasi lainnya.

- d. Sarana dan prasarana sebagai penopang kegiatan masih belum memadai, diantaranya sarana transportasi dan pengujian produk asal hewan. Lokasi dan jumlah unit usaha yang tersebar di beberapa wilayah merupakan tantangan tersendiri dalam proses pembinaan dan pendampingan.
- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh unit usaha sebagian besar belum memenuhi standar GMP (*good manufacturing practice*) sehingga kadang kala menjadi penghambat dalam proses pembuatan rekomendasi dan sertifikasi NKV.

3. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan penerapan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner unit usaha produk hewan di Kabupaten Bandung Barat, belum memiliki SOP secara tertulis tentang tatacara permohonan dan pembuatan rekomendasi NKV oleh unit usaha. Selama ini SOP yang dijalankan masih berupa lisan dan sesuai dengan tugas fungsi jabatan struktural. Sehingga dikemudian hari perlu dibuatkan SOP secara tertulis dan terstruktur, supaya unit usaha yang akan mengajukan surat permohonan rekomendasi tidak kebingungan dan multitafsir, serta mengetahui berapa lama proses tersebut berlangsung.

4. Disposisi (sikap pelaksana)

Sertifikasi NKV produk asal hewan belum sepenuhnya diketahui dan dilaksanakan oleh unit usaha, terutama unit usaha produk hewan skala kecil dan menengah. Hal tersebut terjadi karena unit usaha skala kecil dan menengah belum merasakan manfaat secara utuh pada saat unit usaha tersebut memiliki sertifikat NKV. Beda halnya dengan unit usaha yang sudah besar, mereka memerlukan sertifikat tersebut untuk melakukan proses transaksi jual beli maupun proses ekspor dan import. Karena pada tatanan birokrasi ekport import produk asal hewan, baik yang dijadikan pangan maupun non pangan dipersyaratkan melampirkan sertifikat NKV.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dari uraian pembahasan mengenai kebijakan penerapan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner unit usaha produk hewan dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Edward III, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dari 4 (empat) factor implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi (sikap pelaksana) hampir seluruhnya ditemukan adanya kendala dan hambatan dalam prosesnya. Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan sertifikasi NKV Produk asal hewan belum dirasakan pentingnya bagi unit usaha, padahal apabila melihat dari tujuan diadakannya kebijakan ini begitu bagus untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna, maupun bagi unit usaha itu sendiri.
- b. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh unit usaha sebagian besar belum dilengkapi dengan SOP secara tertulis, walaupun ada SOP nya belum dilakukan revisi perbaikan.
- c. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah maupun unit usaha belum sesuai dengan yang diharapkan, hal tersebut menjadi kendala dalam proses pembuatan permohonan sertifikasi NKV.
- d. Unit usaha yang sudah memiliki NKV, belum sepenuhnya menempelkan dan mempublikasikan kepada masyarakat.

Beberapa alternatif kebijakan yang dapat disarankan supaya implementasi kebijakan sertifikasi NKV unit usaha produk hewan berjalan dengan yang diharapkan, diantaranya yaitu:

- a. Memberikan usulan kepada Direktorat Kesmavet Kementerian Pertanian, untuk mengadakan pelatihan auditor kepada para petugas di Dinas Perikanan dan Peternakan, sehingga sumber daya yang ada di Dinas bertambah.
- b. Memberikan *reward* kepada unit usaha produk hewan yang melaksanakan sertifikasi NKV dan *punishmen* kepada unit usaha yang lalai.
- c. Adanya bantuan sarana dan prasarana penunjang hygiene sanitasi yang sesuai standar.

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

REFERENSI

- Afandi, M.N., Anomsari, E.T., Novira, A. (2021). A Conceptual Model of Localizing the SDGs: Lesson Learned from the Local Development Plan and Practice in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11 (8).
- Anwar, S., Trilestari, E. W., & Agustina, I. (2022). The Tourism Development Policy in Bandung Regency: A Study on Kampung Gamisâ€Soreang. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 19 (1), 112 - 121.
<https://doi.org/10.31113/jia.v19i1.859>
- Bahri, S. (2008). Beberapa aspek keamanan pangan asal ternak di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian*, 1(3), 225-242.
- Iyoega, R.R., Artisa, R.A., Kirana, C.A.D. (2021). Ketahanan Nasional Berbasis Ketahanan Keluarga pada Masa Pandemic Covid-19 di Kabupaten Bandung. *Journal Civics and Social Studies*, 5 (2), 276 - 290.
- Lestariningsih, L., Nada, M. S., Yasin, M. Y., Ropida, S., & Abidin, M. K. (2020). Peranan Nomor Kontrol Veteriner Terhadap Jaminan Mutu Keamanan Produk Hasil Peternakan. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5(1), 180.
<https://doi.org/10.28926/briliant.v5i1.437>
- Maulana, R.R., Priatna, R. (2021). Perancangan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Menunjang Digitalisasi Desa. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8 (6), 419 - 423.
<http://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3753>
- Mulyadi, D., Maulana, R. (2022). Policy Evaluation of Village Head Election in Bandung Regency. *Proceedings of the Third International Conference Administration Science (ICAS 2021)*. DOI 10.4108/eai.15-9-2021.2315255.
- Mulyadi, D., Maulana, R. R. (2021). Government Collaboration Model for Disaster Management Policy in West Bandung Regency. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 100 - 103.
<http://doi.org/10.2991/assehr.k.21062.9.019>
- News, R. (2020). PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN Pra NKV _RadarNews.
- Pertanian, M. (2020). peraturan menteri pertanian no 11 tahun 2020 tentang sertifikat NKV.
- Pratiwi, A.D.R., Ahmad, F., Maasir, L. (2022). From Waste to Golden Opportunity: A Portrait of Community's Social and Economic Transformation Through the Application of the 3R Concept in the Era of Sustainable Development. *IJEBD International Journal Of Entrepreneurship And Business Development*, 5 (3), 447-454.
<https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i3.1823>
- Satriani, T. (2017). Diversifikasi Pangan Asal Ternak Mendukung Keamanan Pangan Nasional. 1, 10-16.
<https://doi.org/10.14334/pros.semnas.tpv-2017-p.10-16>
- Suriati dkk. (2022). *Pengantar Ilmu Komunikasi*.
- Tahir, A. (2018). Kebijakan publik dan good governancy. 1-174.
- Trobos livestock. (2021). Urgensi Sertifikasi NKV dan Halal, Agri Ternak -Trobos Livestock.
- Wijayanti, R., Taufik, N.I. (2022). The Role of Village Funds to Improve Community Welfare: A Study in West Bandung Regency. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development (IJEBD)*, 5 (1), 155-163.
<https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i1.1641>
- Wijayanti, R., Ravenska, N., & Nugroho, A. (2022). Business Model Innovation with Design Thinking Approach at Bumdes Pagerwangi. Proceedings of the Third International Conference Administration Science, ICAS 2021.
<https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315259>